

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. TVRI Sumatera Barat memperoleh pendapatan dari dua sumber utama, yaitu pendapatan dari APBN dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP berasal dari kerja sama produksi dan penyiaran, jasa iklan, jasa liputan berita, serta sewa peralatan siaran dan studio.
2. Metode Pengakuan Pendapatan TVRI Sumbar menerapkan metode cash basis, yaitu pendapatan diakui saat kas diterima. Metode ini digunakan karena pendapatan yang diperoleh umumnya berbasis kontrak dan bersifat tunai.
3. Metode Pengukuran Pendapatan dilakukan berdasarkan nilai nominal kas yang diterima secara langsung. Transaksi tidak menggunakan estimasi nilai wajar, tetapi mengacu pada nilai kontrak dan tarif resmi yang telah disepakati.
4. Metode akuntansi yang digunakan belum sepenuhnya mengadopsi sistem berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya PSAP 13. Hal ini menyebabkan laporan keuangan belum sepenuhnya mencerminkan hak dan kewajiban ekonomi yang sebenarnya.
5. TVRI Sumatera Barat telah memiliki prosedur dan dokumen pendukung yang cukup baik untuk menunjang proses pencatatan pendapatan, namun masih memerlukan penguatan kapasitas dan sistem agar dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan.

5.2 Saran

Merujuk pada temuan dan kesimpulan yang diperoleh selama penelitian, berikut ini penulis sampaikan sejumlah saran yang kiranya dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi usahanya:

1. Penerapan Basis AkruaI Secara Bertahap TVRI Sumatera Barat disarankan untuk mulai menerapkan prinsip basis akruaI terutama dalam pencatatan pendapatan komersial seperti iklan dan kerja sama siaran. Hal ini penting untuk mencerminkan hak pendapatan secara lebih akurat dan relevan.
2. Peningkatan SDM dan Sistem Informasi Akuntansi Perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan bagi staf keuangan mengenai akuntansi berbasis akruaI serta peningkatan sistem informasi akuntansi agar mampu mendukung pencatatan dan pelaporan secara akurat dan tepat waktu.
3. Evaluasi dan Pengembangan Prosedur Akuntansi Prosedur akuntansi perlu ditinjau secara berkala untuk disesuaikan dengan regulasi terbaru serta perkembangan kebutuhan lembaga penyiaran publik.
4. Koordinasi Lebih Intensif dengan Pusat Sebagai satuan kerja daerah dari LPP TVRI nasional, maka koordinasi dan standarisasi antar unit perlu ditingkatkan agar pelaporan keuangan dapat dilakukan secara seragam dan terintegrasi.

Dengan demikian, diharapkan pengelolaan pendapatan di LPP TVRI Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi lebih akuntabel, transparan, serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.